

**STRATEGI PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA
MASA PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 OLEH BADAN
PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

JURNAL



HASHIYATUL FADIAH ADELINA

NPP: 28.1091

PROGRAM STUDI: KEUANGAN DAERAH

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

2021

**STRATEGI PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA
MASA PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE 2019* OLEH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Hashiyatul Fadiah Adelina

Asal Pendaftaran Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Studi Keuangan Daerah, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email: adelhf26@gmail.com

ABSTRACT

This study focuses on the decrease in Vehicle Tax revenues in South Sulawesi Province caused by the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic. Therefore, the Regional Revenue Agency of South Sulawesi Province needs to establish a strategy so it can increase the realization of Vehicle Tax revenues. This study aims to determine the success of the Vehicle Tax during the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic. The method used in this research is descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques used in the form of interviews, observation and documentation. The data analysis techniques used include data reduction, data representation and data verification. The results showed that the Vehicle Tax collection strategy during the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic was successful and running well. As for the obstacles faced during the implementation of the collection of Vehicle Taxes, namely the instability of public economy and the lack of public awareness of the importance of taxes for regional development. The efforts made by the Regional Revenue Agency of South Sulawesi Province are to aggressively socialize the policy of providing incentives for exemption of Vehicle Tax fines both online and offline, providing convenience in the tax payment system and controlling taxpayers who are in arrears by conducting raids and giving ticket sanctions.

Keywords: *Strategy, Vehicle Tax*

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada penurunan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan yang disebabkan oleh Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan perlu menetapkan suatu strategi sehingga dapat meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan strategi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor selama masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor selama masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) berhasil dan berjalan dengan baik. Adapun hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu ketidakstabilan perekonomian masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu gencar melakukan sosialisasi kebijakan pemberian insentif pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor

baik secara *online* maupun *offline*, memberikan kemudahan dalam sistem pembayaran pajak dan melakukan penertiban terhadap wajib pajak yang menunggak dengan melakukan razia dan pemberian sanksi tilang.

Kata Kunci: Strategi, Pajak Kendaraan Bermotor

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu aspek yang digunakan sebagai tolak ukur kemandirian daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Sumber utama pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah sehingga ditarik kesimpulan bahwa semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diterima menunjukkan bahwa daerah mampu melaksanakan asas desentralisasi dengan baik sehingga ketergantungan akan bantuan pusat otomatis akan berkurang.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang berkontribusi paling besar. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang bertanggungjawab langsung terhadap penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan mencatat bahwa dari kelima jenis Pajak Daerah Provinsi, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang berkontribusi paling besar terhadap peningkatan Pajak Daerah dibandingkan jenis pajak lainnya. Sehingga, secara langsung Pajak Kendaraan Bermotor juga berkontribusi besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Fakta di atas dapat dilihat dari data kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tabel 1.1 berikut:

TABEL 1.1
KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
TERHADAP PAJAK DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Tahun	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (Rupiah)	Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pajak Daerah dan PAD			
		Realisasi Pajak Daerah (Rupiah)	%	Realisasi PAD (Rupiah)	%
2017	1,103,139,264,509	3,241,746,521,641	34,0	3,541,046,195,641	31,1
2018	1.242.314.483.837	3.462.184.656.928	35,8	3.691.433.568.776	33,6
2019	1,394,198,331,700	3,946,717,289,114	35,3	4,182,822,978,387	33,3

Sumber : LKIP Bapenda Sulsel 2019 dan Laporan Keuangan Sulsel 2018, diolah

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari tahun 2017 hingga tahun 2019 realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selalu meningkat dan persentase kontribusinya terhadap realisasi Pajak Daerah berada di angka 34,0-35,8% sedangkan persentase kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah berada di angka 31,1-33,3%.

Besarnya angka kontribusi yang diberikan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Pajak adalah potensi besar yang harus digali dan dimanfaatkan dengan baik. Untuk menjaga stabilitas dan peningkatan penerimaan

Pajak Kendaraan Bermotor maka diperlukan suatu strategi yang tepat terkait pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

Berkaitan dengan strategi, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah menerapkan suatu strategi terkait dengan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu dengan memberikan insentif pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor. Harapannya, dengan kebijakan insentif ini wajib pajak dapat memanfaatkannya dengan baik melalui pembayaran pajak. Sehingga, terjadi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan stabilitasnya dapat terjaga.

I.2. Permasalahan

Permasalahan dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2020 yaitu adanya pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang mana berdampak pada stabilitas perekonomian masyarakat yang menurun sehingga masyarakat selaku wajib pajak sangat kesulitan dan merasa terbebani untuk membayar pajak.

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) adalah jenis penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru atau *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Perkembangan dan penularan penyakit ini sangat cepat sehingga oleh pemerintah Indonesia menetapkan penyakit ini sebagai bencana nasional non alam. Selain penularan penyakit yang sangat cepat, tingkat kematian yang disebabkan oleh penyakit ini juga sangat tinggi sehingga pemerintah harus tanggap dalam melakukan langkah pencegahan.

Selain menyediakan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang optimal, pemerintah menyelenggarakan kekarantina kesehatan yang merupakan acuan dalam pemberlakuan kebijakan *lockdown*, *social distancing*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah terdampak penyakit *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) salah satunya di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebagai langkah pencegahan dan memutus rantai penyebaran virus yang meluas.

Kebijakan pencegahan yang diberlakukan oleh pemerintah bertujuan untuk mengurangi aktifitas masyarakat ditempat atau fasilitas umum. Hal inilah yang membawa dampak buruk bagi perekonomian masyarakat utamanya masyarakat menengah ke bawah yang pendapatannya tidak menentu.

I.3. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai strategi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian yang berjudul *Analisis Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah* (Siregar, Zul Efriansyah, 2020) menemukan bahwa strategi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak terkait pentingnya pembayaran pajak dan juga memberikan surat panggilan kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak. Selanjutnya, dalam penelitian yang berjudul *Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam*

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Asriati, Sasmito Chanra, 2016) menemukan bahwa salah satu strategi pemungutan pajak untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu dengan melakukan pemutihan pajak atau penghapusan denda.

Selain itu, penelitian ini juga terinspirasi dari temuan Diah Indah, Iman Surya dan Anwar dalam penelitiannya yang berjudul *Strategi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dalam Peningkatan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau* (2017), mereka menemukan bahwa SAMSAT telah optimal dalam menjalankan visi dan misi yang mereka emban walaupun dalam pelaksanaannya melalui beberapa hambatan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa strategi yang dijalankan oleh SAMSAT dalam meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor yang ada di Kecamatan Talisayan berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor. Selanjutnya, penelitian yang berjudul *Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung* (Indah, Mutiara. 2018) yang menemukan bahwa strategi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan gubernur yang berlaku. Agar masyarakat mengetahui dan UPT pengelolaan pendapatan Tapung lebih mensosialisasikan tentang pentingnya peran Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah dan manfaatnya bagi semua masyarakat.

Acuan lain dari penelitian ini yaitu penelitian Dwi Ajeng Kartini berjudul *Strategi Peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan* (2019) yang menemukan bahwa kinerja penerimaan PKB di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015-2019 sudah cukup baik yang dibuktikan dari rata-rata laju pertumbuhan yang cukup besar disertai dengan tingkat efektifitas yang nyaris sempurna. Alternatif strategi peningkatan PKB di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan urutan prioritas dan nilai bobot yaitu perbaikan sistem pendataan, perbaikan sistem pelayanan, peningkatan kualitas SDM, peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan pengawasan dan pelaporan.

I.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana pada penelitian ini berfokus pada seperti apa strategi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor selama masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), selain itu penelitian ini juga ingin melihat bagaimana penerapan dan keberhasilan strategi yang dibuat dengan acuan teori Pembuatan Strategi yang dikemukakan oleh Hatten dan Hatten (1996) yang mengemukakan bahwa ada 8 petunjuk yang harus diikuti dalam pembuatan strategi agar strategi tersebut dapat dikatakan berhasil dan berjalan dengan baik. Namun, pada penelitian ini penulis hanya menggunakan 7 petunjuk pembuatan strategi yang dimuat dalam dimensi yaitu dimensi konsisten, pengorganisasian, efektif, kritis, landasan keberhasilan, memperhitungkan resiko, dan dukungan eksternal.

I.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai strategi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hambatan dan upaya apa yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama pelaksanaan strategi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19).

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif untuk menggambarkan situasi di lapangan. Penelitian kualitatif deskriptif dilakukan karena penulis ingin mendeskripsikan suatu peristiwa yaitu penerapan strategi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan induktif digunakan karena sangat mendukung penelitian dengan metode kualitatif deskriptif.

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 3 cara yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara terhadap 7 orang informan yang terdiri dari Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Sub Bidang Peraturan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah II Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Validasi Objek dan Subjek Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Unit Pelayanan Teknis Pendapatan Wilayah 1 Makassar Selatan, Kepala Seksi Pendataan dan Penagihan Unit Pelayanan Teknis Pendapatan Wilayah 1 Makassar Selatan, dan 1 orang masyarakat selaku wajib pajak.

Adapun teknik analisis yang digunakan yaitu dengan mereduksi data, menyajikan data, dan, verifikasi data yang mana analisis ini berpatokan pada teori Pembuatan Strategi Hatten dan Hatten (1996).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

III.1. Strategi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Fokus yang dilakukan penulis dalam penelitian ini, yaitu untuk mengkaji apakah strategi yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berhasil dan dapat diakui keberhasilannya. Penulis menggunakan teori Strategi yang dikemukakan oleh Hatten dan Hatten (1996) mengenai petunjuk dalam pembuatan strategi. Berdasarkan teori tersebut, penulis mengambil beberapa dimensi-dimensi yang ada untuk digunakan sebagai alat analisis secara teoretis.

1. Konsisten

Ketidakstabilan ekonomi yang terjadi di masyarakat sejak Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* melanda Indonesia, sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah yang mana terjadinya penurunan pendapatan utamanya bidang pajak daerah sehingga harus dilakukan penyesuaian target pajak yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sebagai respon terhadap permasalahan yang ada, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menerapkan strategi yaitu dengan memberikan Insentif Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor selama masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* tahun 2020 yang disahkan melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 884/III/Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020 dalam Masa Tanggap Darurat *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan kebijakan tersebut, dapat dilihat bagaimana konsistensi dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam membuat strategi untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor dengan tetap memperhatikan kondisi Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* yang terjadi saat ini.

2. Pengorganisasian

Melalui pengorganisasian yang matang, kita dapat membagi tugas kepada orang-orang secara efektif berdasarkan bidang kerjanya sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dan menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diinginkan. Pengorganisasian yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sudah sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap-tiap bagian dan telah ditentukan dan disepakati oleh pihak-pihak terkait, dimana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

Sedangkan untuk tugas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Teknis Pendapatan yang berada di tiap kabupaten/kota yang bekerjasama dengan Kepolisian dan Jasa Raharja dibawah naungan SAMSAT. UPTP sendiri bertugas untuk melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Kepolisian bertugas sebagai pelaksana registrasi dan identifikasi terkait surat kendaraan bermotor, dan Jasa Raharja bertugas untuk memberikan layanan asuransi kecelakaan sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Efektif

Efektif atau tidaknya suatu kebijakan bergantung pada bagaimana upaya yang dilakukan pembuat kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut dan bagaimana keluaran yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Melihat kondisi Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* yang terjadi, dalam rangka pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang sesuai dengan protokol kesehatan dan kebijakan pencegahan lainnya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melalui UPTP SAMSAT di setiap

kabupaten/kota memberikan beberapa jenis pelayanan yang ditujukan untuk memudahkan para wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Pelayanan yang diberikan berupa:

- Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor UPTP SAMSAT ditiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
- Pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui SAMSAT *Dhrive Thru* atau mobil SAMSAT keliling
- Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor melalui aplikasi *e-samsat* atau SAMSAT elektronik yang pembayarannya dapat dilakukan melalui *m-banking*, alfamart, ATM, dan *gopay*.
- Pelayanan operasi tilang gabungan yang dilakukan bersama Kepolisian.
- Pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di tingkat kelurahan yang dilaksanakan di kantor kecamatan dan kantor kelurahan

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengefektifkan kebijakan pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor melalui sosialisasi dan program pelayanan yang ditawarkan telah berjalan sesuai dengan target yang diinginkan, dimana setelah kebijakan pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor diberikan, penerimaan pajak khusus Pajak Kendaraan Bermotor telah meningkat dan mencapai target sesuai dengan data realisasi di atas.

4. Kritis

Maksimalnya pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilihat dari jumlah realisasi pajak yang harusnya lebih tinggi dibandingkan target pajak yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila pada periode berjalan realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan maka sudah dipastikan bahwa ada wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya, hal ini dapat dibuktikan dengan melihat catatan pembayaran pajak pada periode berjalan.

Setiap tahun, akan dilakukan proses verifikasi dan validasi objek dan subjek Pajak Kendaraan Bermotor untuk melihat apakah ada penambahan potensi penerimaan pajak yang baru yang mana dalam pelaksanaan proses verifikasi dan validasi, dalam hal ini pihak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Kepolisian dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Data potensi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 bisa dilihat pada tabel berikut:

TABEL 4.1
DATA POTENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	UPTD	POTENSI		
		RODA 2	RODA 4	TOTAL
1	2	3	4	5
1	SOPPENG	62.411	8.934	71.345
2	SELAYAR	18.297	1.415	19.712
3	BARRU	45.527	6.607	52.134
4	WAJO	143.938	21.013	164.951
5	SINJAI	52.807	4.448	57.255
6	MAKASSAR II	518.786	159.637	678.423
7	BULUKUMBA	102.336	15.236	117.572
8	TATOR	41.265	6.863	48.128
9	PANGKEP	99.829	12.740	112.569
10	BONE	200.387	23.125	223.512
11	ENREKANG	43.128	4.553	47.681
12	BANTAENG	30.516	4.877	35.393
13	JENEPONTO	46.779	7.626	54.405
14	MAROS	139.128	21.625	160.753
15	SIDRAP	124.267	19.680	143.947
16	GOWA	294.661	42.321	336.982
17	PARE-PARE	104.085	27.164	131.249
18	TORUT	46.707	6.052	52.759
19	TAKALAR	95.159	8.894	104.053
20	PINRANG	173.078	16.690	189.768
21	MAKASSAR I	717.452	186.435	903.887
22	BELOPA	119.957	9.186	129.143
23	PALOPO	100.508	11.031	111.539
24	MALILI	108.479	13.231	121.710
25	MASAMBA	113.228	8.350	121.578
TOTAL		3.542.715	647.733	4.190.448

Sumber: Bagian Teknologi Informasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, diolah penulis.

Jumlah potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di atas, kemudian akan dihitung totalnya sesuai dengan rumus yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Hasil perhitungan tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar penetapan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

5. Memperhitungkan Resiko

Proses perencanaan suatu strategi hendaklah memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi, baik dari proses perencanaan hingga proses penetapan dan pelaksanaannya. Sama halnya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menetapkan strategi mengenai pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor selama masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19).

Perhitungan resiko dilakukan dengan membuat penilaian terhadap kinerja aparatur dalam memungut Pajak Kendaraan Bermotor selama masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Selain melakukan penilaian terhadap kinerja aparatur, diperlukan juga upaya pengendalian terhadap hambatan yang mungkin terjadi.

Menyikapi permasalahan tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan kebijakan pembebasan denda Pajak khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selama masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* tahun 2020.

6. Landasan Keberhasilan

Melihat keberhasilan dari suatu strategi yang dijalankan tidak cukup jika hanya dinilai dari segi penerapan strategi tersebut apakah berjalan baik atau tidak, namun keberhasilan ini juga harus dinilai dari segi pencapaian atas pelaksanaan strategi yang dijalankan. Untuk menilai pencapaian tersebut maka diperlukan landasan keberhasilan yang mana hal ini berperan sebagai pembanding atas pencapaian sebelum dan setelah strategi dijalankan.

Landasan keberhasilan ini digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu aspek untuk menentukan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada periode selanjutnya dengan melihat pencapaian atau realisasi penerimaan pajak pada periode sebelumnya.

Adanya kebijakan pemberian insentif pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor selama masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* tahun 2020 membawa dampak positif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020. Dari target pajak yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.1.251.634.287.000,00, setelah penerapan kebijakan maka jumlah realisasi penerimaan sebesar Rp.1.294.202.455.768,00 atau melampaui target dengan persentase 103,40%.

7. Dukungan Eksternal

Dukungan eksternal yang dimaksud penulis yaitu dengan mengusahakan peningkatan kemampuan dari pihak-pihak terkait kegiatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, dan juga dengan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kualitas pelayanan kepada masyarakat selaku wajib pajak.

Petugas pemungut pajak dalam memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak membutuhkan usaha ekstra karena mereka akan melayani berbagai macam karakter dengan kondisi kerja yang berubah-ubah. Oleh karena itu, petugas pemungut pajak merupakan sumber dukungan eksternal yang harus diberikan perhatian untuk peningkatan kemampuan dan kualitas kerjanya berupa kegiatan pelatihan.

Selain kegiatan pelatihan yang dilakukan para petugas pemungut pajak, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai juga sangat diperlukan untuk peningkatan kualitas kerja apalagi dalam kondisi Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai seperti perangkat komputer, jaringan internet yang cepat, dan juga fasilitas

kantor yang mendukung pada lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di bidang pelayanan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sudah sangat memadai sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas kerja para petugas pemungut pajak.

Berdasarkan hasil analisis mengenai bagaimana hasil dari penerapan strategi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan yang dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Teori Pembuatan Strategi yang dikemukakan oleh Hatten dan Hatten (1996), dapat dilihat seberapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan pada penjelasan di bawah ini.

Kebijakan ini membawa dampak positif bagi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan data yang didapatkan pada kegiatan magang, diketahui bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang sebelumnya sempat menurun karena adanya Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), semenjak kebijakan ini diterapkan penerimaan pajak berangsur-angsur mulai membaik hingga akhirnya target Pajak Kendaraan Bermotor dapat terealisasi dengan baik.

TABEL 4.2
KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Tahun	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (Rupiah)	Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah	
		Realisasi (Rupiah)	%
2017	1.103.139.264.509,00	3.541.046.195.641,00	31,1
2018	1.242.314.483.837,00	3.691.433.568.776,00	33,6
2019	1.394.198.331.700,00	4.182.822.978.387,00	33,3
2020	1.294.202.455.768,00	3.932.362.573.604,13	38,1

Sumber :Bagian Perencanaan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, diolah penulis

Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa hingga tahun 2020, Pajak Kendaraan Bermotor masih memberikan kontribusi yang besar terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah. Meskipun pada tahun 2020 sedang dilanda Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), namun karena strategi yang dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat terlaksana dengan baik sehingga target Pajak Kendaraan Bermotor pun dapat tercapai.

III.2. Faktor Penghambat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Melaksanakan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19)

Faktor penghambat yang ditemui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan strategi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yaitu:

1. Ketidakstabilan Perekonomian Masyarakat

Meskipun strategi pemberian insentif pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor pada masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah berjalan dengan baik yang ditunjukkan dengan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang melampaui target, namun tidak bisa dipungkiri bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tetap mengalami penurunan yang signifikan apabila dibandingkan dengan penerimaan pajak pada 3 periode sebelumnya.

Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh penurunan pendapatan masyarakat selama Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Ketidakstabilan ekonomi yang dialami oleh masyarakat membuat proses pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang kurang maksimal karena masyarakat lebih mementingkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibandingkan membayar pajak.

2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Pajak bagi Pembangunan Daerah

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penerimaan pajak bagi pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor namun kendaraan tersebut tidak teregistrasi dalam potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal ini disebabkan karena banyak masyarakat yang membeli kendaraan bermotor di luar provinsi Sulawesi Selatan dengan alasan menghindari pembayaran pajak yang tinggi. Ini tentu saja sangat merugikan daerah karena potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang harusnya masuk ke kas daerah Provinsi Sulawesi Selatan beralih ke kas daerah provinsi lain.

III.3. Upaya yang Dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Mengatasi Hambatan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19)

Menyikapi hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) tahun 2020, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan berbagai upaya untuk mendukung kegiatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan berupa:

1. Sosialisasi Kebijakan Pemberian Insentif Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Kebijakan pemberian insentif pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor selama masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) tahun 2020 gencar disosialisasikan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan baik secara *online* melalui media sosial *instagram*, *twitter* dan *website* maupun secara *offline* melalui pemasangan reklame di beberapa titik strategis di tiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

Upaya sosialisasi dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui bahwa pemerintah memberikan kebijakan insentif pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor selama masa Pandemi *Corononavirus Disease 2019* (Covid-19) sehingga mereka dapat memanfaatkan kebijakan ini dan segera membayarkan pajaknya.

2. Kebijakan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus yang semakin meluas yaitu dengan menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat di tempat dan fasilitas umum. Menyikapi hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan beberapa solusi untuk memudahkan wajib pajak yang akan membayarkan pajaknya.

Solusi yang diberikan yaitu dengan menyediakan aplikasi *e-SAMSAT* yang dimana aplikasi ini dapat digunakan oleh wajib pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotornya tanpa harus mendatangi kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) secara langsung. Sistem pembayaran pajak yang disediakan oleh aplikasi ini juga sangat beragam, pembayaran pajak bisa dilakukan baik melalui mesin ATM langsung, aplikasi *m-banking*, *gopay*, gerai alfamart dan juga gerai indomart.

Selain menyediakan sarana pembayaran online, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Unit Pelayanan Teknis Daerah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (UPTD SAMSAT) juga menyediakan mobil SAMSAT Keliling atau SAMSAT *Dhrive Thru*. Mobil ini biasanya parkir di kantor Kecamatan dan dibeberapa titik strategis di tiap kabupaten/kota untuk menunggu wajib pajak yang akan membayar Pajak Kendaraan Bermotor tahunannya.

3. Penertiban Terhadap Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor

Tunggakan yang dibuat karena kurangnya kesadaran para wajib pajak ini berpotensi merugikan daerah karena seperti yang diketahui bahwa pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai kontribusi yang besar atas penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Unit Pelayanan Teknis Daerah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (UPTD SAMSAT) melakukan penertiban terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Kegiatan penertiban ini dilakukan dengan melaksanakan razia dan memberikan sanksi tilang kepada wajib pajak yang terbukti menunggak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

III.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Strategi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berupa pemberian insentif pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor selama masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) membawa angin segar bagi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis menemukan bahwa hasil analisis strategi berdasarkan teori Pembuatan Strategi Hatten dan Hatten

(1996) menunjukkan bahwa strategi pemberian insentif pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor dapat dikatakan berhasil. Hal ini dinilai berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2020 yang melampaui target pajak, meskipun jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun-tahun sebelumnya memang mengalami penurunan. Sama halnya dengan temuan (Siregar, 2020) bahwa strategi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak terkait pentingnya pembayaran pajak dan juga memberikan surat panggilan kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan juga menerapkan strategi ini untuk mendukung kebijakan pemberian insentif pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan.

Layaknya strategi lainnya, kebijakan pemberian insentif pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan juga menemui beberapa kendala, diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak. Selain itu, permasalahan utamanya yaitu ketidakstabilan perekonomian masyarakat dikarenakan adanya Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu analisis strategi berdasarkan teori pembuatan strategi yang dikemukakan oleh Hatten dan Hatten (1996) menunjukkan bahwa ketujuh dimensi pembuatan strategi yaitu Konsisten, Pengorganisasian, Efektif, Kritis, Memperhitungkan Resiko, Landasan Keberhasilan dan Dukungan Eksternal telah dilakukan dengan baik sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor selama masa Pandemi *Coronavirus Disease (Covid-19)* berhasil. Adapun hambatan yang ditemui selama pelaksanaan strategi yaitu terjadinya ketidakstabilan perekonomian masyarakat karena adanya penurunan pendapatan masyarakat selama Pandemi *Coronavirus Disease (Covid-19)* dan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah. Dalam rangka mengatasi hambatan tersebut, upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu gencar melakukan sosialisasi kebijakan pemberian insentif pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor baik secara *online* maupun *offline*. Selanjutnya memberikan kebijakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui sistem pembayaran pajak yang dipermudah. Upaya yang terakhir yaitu melakukan penertiban terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan melakukan razia dan pemberian sanksi tilang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004 *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Afrizal. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Assauri, Sofjan. 2013. *Strategic Management*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Herlina, Rahman, 2005. *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta : Arifgosita.
- Hutagalung, M. Edward. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nazir, Moh. 2017. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Noor, Juliansyah. 2017. *Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Salusu, J. 2008. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo.
- Silalahi, Ulber. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet
- Diah Indah, Iman Surya dan Anwar. 2017. *Strategi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dalam Peningkatan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau*. Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Indah Mutiara. 2018. *Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Kartini, Dwi Ajeng. 2019. *Strategi Peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan*. Skripsi. Institut Pertanian Bogor.